

mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat proses lahirnya pesantren. Setidaknya perbedaan pandangan ini dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar.¹¹

Pertama, kelompok ini berpendapat bahwa pesantren merupakan hasil kreasi anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu-Budha. Pesantren disamakan dengan *mandala* dan *asrama* dalam khazanah lembaga pendidikan pra-Islam. Nurcholis Madjid menegaskan pesantren mempunyai hubungan historis dengan lembaga pra-Islam yang sudah ada semenjak kekuasaan Hindu-Budha, sehingga tinggal meneruskannya melalui proses Islamisasi dengan segala bentuk penyesuaian dan perubahannya. Termasuk dalam kelompok ini adalah Th. G. Th. Pigeaud dalam bukunya, *Java in the Fourteenth Century*; Zamarkhsary Dhofier dalam Kitab Kuning: *Studi Tentang Pandangan Kyai*, dan Nurcholis Madjid dalam *Bilik-Bilik Pesantren*.¹²

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah. Kelompok ini meragukan pendapat yang pertama bahwa lembaga *mandala* dan *asrama* yang sudah ada semenjak zaman Hindu-Budha merupakan tempat berlangsungnya pengajaran tekstual sebagaimana di pesantren. Termasuk dalam kelompok ini adalah Martin Van

¹¹Hanun Asrahah, *Pelebagaan Pesantren: Asal Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa* (Jakarta: Depag RI, 2004), 1-7.

¹²Amin Haedari et al., *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Globalitas dan Tantangan kompleksitas Global* (Jakarta: IRD Press, 2004), 2.

- a. *Content integration*, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu.
- b. *The Knowledge Construction Process*, yaitu membawa siswa untuk memahami, menyelidiki, menentukan bagaimana melibatkan penerimaan budaya, dari berbagai bingkai perspektif yang dengannya dibangun sebuah konstruksi pengetahuan yang baru.
- c. *An Equity Pedagogy*, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun strata sosial.
- d. *Prejudice Reduction*, yaitu fokus pada karakter-karakter dan nilai-nilai kebudayaan peserta didik yang dengannya pendidik dapat memodifikasi pembelajarannya.
- e. *An empowering school culture*, yang bisa dilakukan dengan melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam olahraga, berinteraksi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Kelima dimensi di atas, adalah penyempurnaan dari dimensi pendidikan multikultural James A. Banks. Karena dalam tulisan sebelumnya, menyebutkan bahwa dimensi pendidikan multikultural adalah: *content integration*, *knowledge construction*, *an equity pedagogy*, *an empowering school culture*, dan *the school a*

- a. Setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka.
- b. Peserta didik belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis.
- c. Mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar.
- d. Mengakomodasi semua gaya belajar.
- e. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda.
- f. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda.
- g. Untuk menjadi warga yang baik di sekolah maupun di masyarakat.
- h. Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda.
- i. Untuk mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global.
- j. Mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis.⁶⁵

Di samping tujuan-tujuan pendidikan multikultural yang telah disebutkan, pada dasarnya paradigma multikultural yang didasarkan pada nilai dasar toleransi, empati, simpati dan solidaritas sosial, maka hasil dari proses pendidikan multikultural diharapkan dapat mendorong terciptanya perdamaian dan upaya mencegah serta menanggulangi konflik etnis, konflik umat beragama, radikalisme agama, separatism dan disintegrasi bangsa. Pendidikan multikultural

⁶⁵Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 2011), 222.

tidak bisa dikatakan berhasil. Artinya, perlu dilakukan evaluasi kembali tentang apa yang menyebabkan kegagalan pendidikan tersebut.

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan di atas, diperlukan beberapa prasyarat. *Pertama*, secara teologis-filosofis diperlukan kesadaran dan keyakinan bahwa setiap individu dan kelompok etnis itu unik, namun dalam keunikannya, masing-masing memiliki kebenaran dan kebaikan universal, hanya saja terbungkus dalam wadah budaya, bahasa, dan agama yang beragam dan bersifat lokal.

Kedua, secara psikologis memerlukan pengondisian agar seseorang mempunyai sikap inklusif dan positif terhadap orang lain atau kelompok yang berbeda. Cara paling mudah untuk menumbuhkan sikap demikian adalah melalui contoh keseharian yang ditampilkan orangtua, guru, di sekolah dan pengajaran agama.

Ketiga, desain kurikulum pendidikan dan kurikulum sekolah harus dirancang sedemikian rupa sehingga anak didik mengalami secara langsung makna multikultural dengan panduan guru yang memang sudah disiapkan secara matang.

Keempat, pada tahap awal hendaknya diutamakan untuk mencari persamaan dan nilai-nilai universal dari keragaman budaya dan agama yang ada sehingga aspek-aspek yang dianggap sensitif dan mudah menimbulkan konflik tidak menjadi isu dominan.

pandangan; serta (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk menemui dan mengekspresikan kepribadian individual.

Kemudian, seiring berjalannya waktu, penggunaan istilah demokrasi ini pun terus berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, demokrasi tetap mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.

Jika nilai demokrasi ini dibawa ke ranah pendidikan, maka mengandung pengertian adanya pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses belajar-mengajar antara pendidik dan peserta didik, serta keterlibatan lembaga pendidikan.

c. Nilai Kesamaan/kesetaraan

Kesetaraan yang memiliki kata dasar setara bisa disinonimkan dengan kesederajatan yang mempunyai kata dasar sederajat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sederajat ini memiliki arti sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan kata lain, kesetaraan atau kesederajatan ini menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain.

Kemudian, jika nilai ini dimasukkan ke dalam pendidikan adalah adanya proses pendidikan yang tidak menjadikan dan memperlakukan peserta didik satu lebih spesial dari peserta didik lainnya, atau sebaliknya menjadikan

hanya sebatas memandang realita kemajemukan sebatas pengakuan. Karena seperti yang telah kita ketahui, bahwa Islam yang merupakan agama termuda dalam tradisi Ibrahimi, dari awal kelahirannya sudah melibatkan unsur kritis pluralisme, yaitu hubungan Islam dengan agama lain.

Dengan penghormatannya yang sangat tinggi terhadap kebebasan, di samping dengan ajarannya yang terbuka, Islam – pada akhirnya – masuk ke dalam komunikasi bangsa dan antar bangsa – yang penuh dengan kemajemukan – dengan sikap yang wajar, pemikiran terbuka, dan tanpa prasangka. Pada tahap inilah Islam telah benar-benar menjadi *rahmat bagi seluruh alam* (QS. Al-Anbiya: 107).⁸⁴

Lebih lanjut, di samping Islam memiliki doktrin-doktrin eksklusif, ia juga memiliki doktrin-doktrin inklusif-pluralis, yang di dalamnya terkandung semangat menghargai dan mengakui kebenaran agama lain. Teologi inklusif-pluralis ini telah diteladankan pada tingkatan praksis oleh Rasulullah ketika menjadi pemimpin politik dan agama di Madinah. Beliau memberikan hak dan jaminan yang sama bagi non-muslim selama tidak memusuhi Islam. Komitmen tersebut terangkum dalam Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah.⁸⁵

Dengan Piagam Madinah ini, Nabi telah meletakkan pondasi bagi kehidupan bernegara, terlebih bagi yang bermasyarakat majemuk baik suku, ras,

⁸⁴A.M. Fatwa, Hak Asasi Manusia, “Pluralisme Agama, dan Ketahanan Nasional”. Dalam Anshari Thayib (Eds), *HAM dan Pluralisme Agama* (hlm. 27-38) (Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997), 33.

⁸⁵Umi Sumbulah, *Islam Radikalisme Dan Pluralisme Agama; Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi* (Kementerian Agama: Badan Litbang dan Diklat, 2010), 59.

Pertama, pendidikan Islam yang berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kesetaraan. Basis-basis doktrinal yang mendukung prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam QS. As-Syura [42]: 38; QS. Al-Hadid [57]: 25; dan QS. Al-A'raf [07]: 18. Para intelektual muslim mengakui bahwa ayat-ayat tersebut menyediakan basis-basis moral dan etika yang mendukung prinsip keadilan, demokrasi, dan kesetaraan. Antara seorang muslim dengan muslim lainnya maupun seorang muslim dengan non-muslim harus diperlakukan adil. Karena bagaimana pun juga Al-Qur'an mengajarkan model interaksi sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.⁹³

Prinsip keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia ini dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Dalam satu kesempatan Rasulullah saw. bersabda: *“tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, kecuali karena takwanya.”* (HR. Imam Ahmad). Sehingga, baik itu Al-Qur'an atau as-Sunnah sama-sama melarang rasisme maupun dominasi kebenaran oleh satu etnik terhadap etnik lainnya. Dalam Islam, perbedaan umat manusia yang didasarkan pada unsur budaya, adat-istiadat, atau pun warna kulit dianggap sesuatu yang tidak penting. Karena Islam menegaskan bahwa manusia sama di hadapan Tuhan dan hukum. Sehingga, akan menjadi tidak relevan apabila pendidikan Islam menyimpang dari semangat multikultural yang didukung oleh doktrin Islam sendiri.

⁹³Lihat penjelasan Abd al-Lathif ibn Ibrahim, *Tasamuh al-Gharb ma'a al-Muslimin fi al-'Ashr al-Hadir* (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1999), 44-45.

Kedua, pendidikan Islam multikultural tidak bisa dilepaskan dari karakteristiknya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian. Islam memahami manusia sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dalam karakteristiknya sebagai makhluk yang berdimensi spiritual, manusia memiliki relasi khusus antara dirinya dengan Tuhannya (*habl min Allah*). Sedangkan dalam konteksnya sebagai makhluk yang berdimensi sosial, manusia memiliki relasi dan hukum-hukum untuk berinteraksi antar sesamanya (*habl min al-nas*). Pada level *habl min al-nas* inilah manusia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian. Sehingga, manusia memang harus tunduk di bawah hukum Allah yang dikenal sebagai “hukum kesatuan kemanusiaan” (*the unity of humankind*).⁹⁴

Dua dimensi kemanusiaan di atas meniscayakan kewajiban bersama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kebersamaan dan perdamaian misalnya, tidak akan terwujud apabila manusia lebih mengedepankan egoisme, baik itu egoisme pribadi atau pun kelompok.⁹⁵ Di samping itu, kebersamaan dan perdamaian tidak dapat terwujud tanpa disertai kehendak terdalam manusia untuk hidup rukun, tolong menolong, dan menghargai perbedaan demi mewujudkan integrasi. Dari sinilah kemudian dapat disimpulkan jika pendidikan Islam memiliki peran vital dalam rangka mencetak manusia yang paripurna (*insan*

⁹⁴Abdul Aziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism* (New York: Oxford University Press, 2001), 11.

⁹⁵Lihat penjelasan Hassan Hanafi mengenai pentingnya memelihara kelangsungan hidup manusia dalam Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, terj. Ahmad Najib (Yogyakarta: Jendela, 2001), 101-105.

kamil) dalam segala dimensinya yang salah satunya terwujud dalam hal menghargai multikultural.

Ketiga, pendidikan Islam multikultural memiliki karakteristik sebagai pengembang sikap-sikap sosial yang positif seperti *mengakui*, *menerima* dan *menghargai keragaman*. Dengan kata lain, pendidikan Islam multikultural ditandai dengan upaya-upayanya untuk melahirkan output yang memiliki sifat-sifat sosial positif tersebut. Sejarah mencatat, ajaran Islam disampaikan oleh Rasulullah saw. kepada para sahabatnya di tengah-tengah kehidupan sosial-masyarakat yang majemuk baik itu di kota Makkah maupun di Madinah. Keragaman budaya dan tradisi saat itu sudah ada, namun demikian itu tidaklah menjadi penghambat dalam pendidikan Islam. Baik Rasulullah saw. ataupun para sahabat-sahabatnya sangatlah menghargai kemajemukan, dan para sahabat-sahabat inilah cerminan dari *output* pendidikan awal dalam Islam yang menghargai perbedaan.

Terkait dengan perbedaan dan keragaman ini, Islam memandangnya sebagai suatu hakikat ontologis (*haqiqah wujudiyah/kauniyah*) dan sunnatullah, termasuk di dalamnya adalah *truth-claim* (klaim kebenaran) yang absolut yang merupakan jati diri serta identitas dari salah satu agama. Dengan kata lain, Islam memperlakukan agama-agama lainnya sebagaimana adanya (*as the way they are*) dan membiarkan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa reduksi dan manipulasi. Apapun kondisinya, klaim kebenaran harus diapresiasi, tidak boleh disimplifikasikan, apalagi dinafikan atau dinegasikan. Klaim kebenaran bagi

